

## YANG MINORITAS : YANG TERTINDAS (ANALISIS KONFLIK AHMADIYAH VS “ISLAM”)

**Sujadmi, S.Sos., M.A\***

### *Abstract*

Power is everywhere, so is revealed by Foucault. Power possessed by the majority who don't rarely brought the existence of a conflict with minority parties. Similarly, religion, religions are like two sides of a coin. On the one hand the belief gave way towards peace, but on the other side of religion considered to be a source of division in the community. The religion of the majority religion is considered as a powerful or have power in society even more dominant than countries with other religions are minorities. Religious conflicts have often occurred in different countries and even Indonesia are in fact as a multicultural country in religion. Conflict not only between different faiths, even some internal conflict / co-religionists because of differences in the interpretation of scripture that ultimately led to anarchy. Religious issues will be difficult to overcome if both parties use their eyes in search of the truth. As a multicultural country, should all parties can appreciate and respect each other and understand and understand the Human Rights owned by each individu. Freedom of religion is one of the rights that should be protected. In the cases of minorities in this country, should the state government in this case is able to protect its citizens and uphold human rights in the embrace and believe in a religion.

### *Keywords :*

Religious Conflict, Ahmadis, and Human Rights

*“Agama acapkali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda”  
(Afif Muhammad - IAIN Bandung)<sup>1</sup>*

*identitas kelompok mayoritas” (Haryatmoko)<sup>2</sup>*

*“Kebencian merupakan penyebab utama kekerasan masal yang mewabah di Indonesia terlebih soal agama dan kebencian atas nama agama inilah yang sulit untuk diredam”*

*“Apa yang ditafsirkan dan mendapat pembenaran dari agama adalah hubungan kekuasaan, karena setiap tindakan dan kekuasaan selalu mencari legitimasi. Agama berperan sebagai sistem pembenaran dominasi yang berakar pada*

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang multikultur dan pengakuan itu dibuktikan dengan adanya pegakuan akan Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat dan beragama pun dijamin oleh negara yang termuat dalam UUD (Undang-undang Dasar) 1945. Sebagai negara multikultur dengan banyak pulau, maka masyarakat Indonesia sangat rentan konflik karena penduduknya yang tersegragasi dalam kelompok-kelompok etnis keagamaan. Segragasi sosial inilah yang memberikan

---

\* Penulis adalah Dosen pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

<sup>1</sup> Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*. Rosda Karya:Bandung, 2006, hal. 217.

---

<sup>2</sup> Haryatmoko, *Dominasi penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Gramedia: Jakarta, 2010, hal. 294.

peluang besar dalam dinamika konflik yang berujung pada kekerasan terkait isu-isu etnis dan agama. Konflik sendiri merupakan pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.<sup>3</sup>

Akan tetapi pasca meletusnya reformasi tahun 1998, tindak kekerasan semakin marak melanda negara yang notabene berbhinneka tunggal ika ini. Konflik-konflik yang disinyalir sudah lama ada yang sifatnya laten, dengan munculnya reformasi menjadi konflik-konflik manifest yang dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan sosial. Lima belas tahun sudah era reformasi dikumandangkan, serasa selama itu pula kian lama kebhinekaan negara ini semakin terancam. Dinamika konflik yang berujung pada kekerasan seakan tiada hentinya menghiasi bumi pertiwi ini. Isu-isu konflik tersebut banyak menyangkut persoalan etnis dan agama. Sehingga banyak konflik-konflik yang muncul dengan membawa nama agama.

Agama disini senantiasa menampilkan dua sisinya yang berbeda. Pada satu sisi agama menawarkan perdamaian, ketenangan dan ketentraman, akan tetapi disisi lain menampilkan sisi kekerasan. Sisi kekerasan akan muncul ketika kebenaran satu agama tertentu berbenturan dengan kebenaran agama yang lain. Seperti yang dinyatakan oleh J. Efendi bahwa agama pada suatu waktu memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan dan persaudaraan. Akan tetapi pada waktu yang lain menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang tercatat dalam sejarah menimbulkan konflik, hingga ke kekerasan dan

peperangan.<sup>4</sup> Wajah ganda agama inilah yang menunjukkan adanya mekanisme peran agama yang rentan terhadap kekerasan. Peran agama akan terkait dengan kekerasan ketika agama sebagai kerangka penafsiran religius hubungan sosial (fungsi ideologis, agama sebagai faktor identitas dan agama sebagai legitimasi etis hubungan).<sup>5</sup>

Ketiga peran tersebut menunjukkan rentannya sisi agama yang dikaitkan dengan timbulnya fenomena kekerasan yang semakin sering nampak di Indonesia akhir-akhir ini. Akan tetapi sering muncul pembelaan yang menyatakan bahwa agama mengajarkan perdamaian dan menentang kekerasan. Ironisnya manusia menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga menyulut kekerasan. Adanya konflik dan tindak kekerasan tidak terlepas dari adanya perbedaan dan faktor kepentingan. Berbicara kepentingan tak terlepas dari upaya menguasai dan dikuasai oleh kaum mayoritas terhadap minoritas. Indonesia sebagai negara yang plural, tetapi terkait agama memang Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh warga masyarakatnya.

Fenomena yang terjadi beberapa waktu terakhir ini khususnya tiga tahun terakhir menunjukkan adanya konflik keagamaan yang dianut mayoritas penduduk negeri ini. Islam merupakan agama yang banyak penganutnya. Banyak pula organisasi atau gerakan yang mengatasnamakan sebagai organisasi gerakan Islam. Berbagai macam organisasi gerakan keagamaan yang berkembang, NU

---

<sup>3</sup> Susan, N, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontempore*, Kencana: Jakarta, 2009.

---

<sup>4</sup> Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Rosda Karya: Bandung, 2006, hal. 217.

<sup>5</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas: Jakarta, 2003, hal. 263.

(Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah sebagai contohnya. Keduanya merupakan organisasi Islam yang besar di Indonesia ini.

Fenomena konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama tersebut dapat diamati dari pemberitaan di media-media terlebih pasca reformasi 1998. Pemberitaan di media-media baik media massa maupun media elektronik tersebut tak terlepas dari persoalan konflik dan kekerasan yang berkedokkan agama. Isu dan tindakan teror serta sikap anarkhis terhadap suatu kelompok atau golongan terus melanda negara ini. Pembakaran tempat-tempat ibadah dan aksi kekerasan terhadap antar pemeluk agama terus menghiasi pemberitaan di media-media baik dalam maupun luar negeri. Salah satu media massa dalam negeri menyebutkan bahwa dalam tenggang waktu 6 tahun terakhir telah banyak terjadi insiden kekerasan yang terkait dengan SARA. Sedikitnya 17 insiden yang melanda di beberapa kota di negara kita Indonesia ini. Sebagian besar insiden tersebut berujung pada tindak kekerasan dan pembakaran tempat-tempat ibadah. 10 insiden diantaranya terkait jemaah Ahmadiyah.<sup>6</sup>

Tindakan kekerasan yang terjadi terhadap Jemaah Ahmadiyah ini dilakukan oleh sekelompok orang baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Insiden terhadap jemaah Ahmadiyah tidak hanya terjadi disatu tempat tetapi di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Sebagai contoh peristiwa yang terjadi di Cikeusik-Pandeglang Banten. Pada tragedi penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah tersebut menelan 3 korban meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Tragedi tersebut

terjadi pada Minggu, 6 Februari 2011. Berbagai bentuk kekerasan pun dialami oleh para warga Ahmadiyah mulai dari kekerasan yang bersifat struktural hingga kekerasan fisik yang mereka dapati dari warga non Ahmadiyah.

Dengan maraknya konflik dan tindak kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah tersebut, maka yang menjadi tanda tanya besar disini adalah, **Pertama**, apa yang menyebabkan Jemaah Ahmadiyah mengalami tindak kekerasan?, **Kedua**, bagaimanakah agar dapat terwujud perdamaian dan kerukunan antar pemeluk umat beragama di negara yang multikultur ini? Dengan demikian melalui tulisan ini diharapkan dapat diketahui alasan mengapa terjadi tindak kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Selain itu juga mencoba untuk mengetahui bagaimana solusi agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas di negara ini.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Jemaah Ahmadiyah : Sebuah Realitas

Untuk mengawali pembahasan mengenai kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah ini, maka yang menjadi pertanyaan awal adalah Siapakah sebenarnya Jemaah Ahmadiyah itu? Mengapa mereka sering terjadi konflik kekerasan yang luar biasa akhir-akhir ini?.

Jemaah Ahmadiyah merupakan suatu gerakan keagamaan (Islam) yang mulanya didirikan di Qadian oleh H.Mirzam Gulam Ahmad pada tahun 1889. Ahmadiyah bukanlah suatu agama. Agama yang dianutnya adalah Islam.<sup>7</sup> Perkembangannya pun masuk ke Indonesia pada tahun 1925 oleh Hz.Mlv.Rahmat Ali

<sup>6</sup> Harian Kompas, Edisi 14 Februari 2011.

<sup>7</sup> <http://ahmadiyya.or.id/>, diakses pada Sabtu, Tanggal 18 Juni 2011.

ra. Pada tahun 1932 Jemaah Ahmadiyah telah berdiri di Batavia (Jakarta) dan semenjak itulah perkembangannya sangat pesat dan menyebar ke Jawa Barat dan berbagai daerah. Semenjak tahun 1935 pusatnya pun berada di Jakarta dan pada tahun 1987 pindah ke Parung di Bogor.<sup>8</sup> Melihat dari sejarahnya tersebut maka pada dasarnya aliran ini sudah ada dan menyebar di Indonesia sebelum negara ini terbentuk (merdeka). Keberadaan mereka merupakan sebuah realitas yang tak dapat dipungkiri keberadaannya dan merupakan bagian dari warga negara Indonesia ini. Warga negara yang juga mempunyai hak untuk hidup dan hak perlindungan untuk memperoleh rasa aman.

## 2.2 Gambaran Islam (MUI) terhadap Ahmadiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.<sup>9</sup> MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini terdiri dari perwakilan para ulama, cendekiawan yang merupakan perwakilan/utusan dari organisasi Islam pada tingkat pusat. Organisasi Islam yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini diantaranya NU (Nahdatul

Ulama), Muhammadiyah, DMI, Al Washliyah dan sebagainya. MUI (Majelis Ulama Indonesia) disini memiliki beberapa peran yang salah satunya adalah sebagai pemberi Fatwa.

Meskipun MUI (Majelis Ulama Indonesia) mewadahi beberapa organisasi Islam, tetapi pada realitasnya organisasi yang dominan dan besarlah yang memegang kewenangan. NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam yang mayoritas dan dominan atau bisa dibilang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam setiap mengambil keputusan (penentuan fatwa). Sehingga disini ketika agama sudah dilembagakan (dibentuk sebuah institusi), maka akan terdapat sebuah struktur. Sebuah tatanan yang dimana akan terbentuk dua kubu. Disatu sisi ada kubu/pihak yang diatur dan mengatur atau menguasai dan dikuasai oleh pihak mayoritas terhadap kaum minoritas.

Jemaah Ahmadiyah sebagai salah satu gerakan Islam yang realitasnya telah ada di Indonesia sejak dulu tetapi merupakan kelompok kecil yang tidak memiliki suara pada lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang notabene kumpulan dari beberapa para golongan/organisasi Islam. Posisi aliran Jemaah Ahmadiyah bahkan tidak diakui dan dituding diluar dari ajaran agama Islam. Karena adanya perbedaan terkait pemaknaan/penafsiran kitab suci tentang kenabian, maka Jemaah Ahmadiyah dipaksa untuk mengikuti keyakinan akan tafsir yang secara mayoritas (MUI) dianut dinegara ini dan kalau tidak harus keluar dari negara ini atau dimusnahkan (dilarang keberadaannya) di Indonesia yang banyak menganut aliran Islam Sunni.

<sup>8</sup> <http://www.alislam.org/indonesia/latar.html>, Diakses pada Sabtu, Tanggal 17 Juni 2011

<sup>9</sup> [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=53](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53), Diakses pada Sabtu, tanggal 17 Juni 2011.

### **2.3 Alasan Mendasar Yang Membuat Islam “Memusuhi” Jemaah Ahmadiyah**

MUI memegang peranan yang dominan dalam setiap fenomena yang terkait kehidupan beragama (Islam) di Indonesia. Bahkan dengan hadirnya MUI (Majelis Ulama Indonesia) beserta fatwa-fatwa yang dikeluarkan dapat mengerahkan massa dengan kekuatan yang besar dari berbagai golongan dimasyarakat. Peran negara seakan lebih lemah dibanding MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai sebuah lembaga yang telah memiliki legitimasi dimata publik, MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam setiap tindakan dan memperoleh dukungan besar. Untuk contoh Jemaah Ahmadiyah, dengan kekuasaan dan legitimasi yang dimiliki MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa bahwa Jemaah Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan harus di usir atau dibubarkan dari negara ini. Fatwa ini dikeluarkan baik oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pusat maupun MUI (Majelis Ulama Indonesia) daerah-daerah. Dengan kekuasaan dan kelegitimasiannya itulah banyak kalangan yang dengan serontak mengikuti dan melaksanakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan dinilai legal karena mengacu pada fatwa yang dikeluarkan MUI HAM (Hak Asasi Manusia). Menentang MUI (Majelis Ulama Indonesia) berarti diidentikkan dengan menentang pemerintah dan umat muslim di Indonesia.

Jemaah Ahmadiyah merupakan golongan yang memiliki perbedaan pemahaman dan pemaknaan mengenai Islam terkait kenabian dari golongan atau kelompok-kelompok Islam lain. MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai payung

lembaga dari golongan atau kelompok-kelompok Islam di Indonesia tidak menerima atas adanya perbedaan penafsiran yang diyakini kaum Jemaat Ahmadiyah tersebut. Sehingga lembaga yang memiliki legitimasi dan memiliki kekuasaan (kaum mayoritas) ini pun menghimbau pada JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia) untuk tunduk dan ikut pada penafsiran yang mayoritas dianut di Indonesia. JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia) dinilai sesat oleh kaum Islam secara mayoritas bahwa kaum JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia) ini meyakini bahwa nabi yang dijanjikan dalam al-kitab telah datang dan dia adalah H.Mirza Gulam Ahmad sebagai Al-Masih dan Imam Mahdi. Ketika penolakan terjadi maka terjadi gejolak atau sebuah pemaksaan yang berujung pada tindak kekerasan.

Jemaah Ahmadiyah yang menyatakan bahwa mereka beragama Islam, sebuah agama yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia yang akhir-akhir ini justru mengalami tindak kekerasan dari umat yang menyatakan dirinya juga beragama Islam. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, mengapa masyarakat negeri ini terutama ummat Islam justru memusuhi dan tidak menerima keberadaan umat Islam yang tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah?

Umat Islam itu sendiri membentuk berbagai macam organisasi gerakan atas nama Islam. Dari sekian banyak organisasi yang ada, NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah merupakan organisasi islam yang dominan dinegara ini. Ahmadiyah sama halnya organisasi gerakan Islam seperti NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al Washliyah, dan organisasi lainnya. Sudah barang tentu dengan adanya berbagai macam organisasi gerakan Islam

menunjukkan adanya sebuah pandangan atau penilaian yang berbeda terhadap ajaran-ajaran didalamnya sehingga mereka tidak menyatu dan cenderung membentuk kelompok-kelompok sendiri yang memiliki kesamaan pandangan dan paham walaupun mayoritas menganut aliran Sunni.

Kitab suci (Al-Qur'an) merupakan wahyu dari Allah dan mengandung pemaknaan yang multitafsir. Setiap orang atau kelompok memiliki perbedaan dalam menafsirkan setiap isi yang ada didalamnya. Karena penafsiran yang berbeda inilah yang menimbulkan munculnya aliran-aliran atau golongan-golongan yang berbeda pula. Kemudian mengapa Ahmadiyah? Disini Ahmadiyah memiliki penafsiran yang berbeda dari mayoritas penganut Islam di negara ini. Perbedaan yang dinilai sangat mendasar dan fundamen yang berbeda dari aliran lain. Perbedaan yang dinilai paling mendasar antara Ahmadiyah dengan penganut Islam lain adalah terletak pada pemahaman dan pemaknaan mengenai Al-Masih dan Imam Mahdi (ke-nabi-an). Dimana golongan kaum Islam mayoritas berpandangan bahwa Al-Masih masih hidup dan akan turun kebumi ketika menjelang akhir zaman nanti kemudian akan datang seorang juru penyelamat ummat manusia (Imam Mahdi). Sedangkan Jemaat Ahmadiyah meyakini dan percaya bahwa Al-Masih sudah mati dan Al-Masih yang dijanjikan datang lagi ke bumi dan nabi yang dijanjikan dalam Al-Kitab (Al-Qur'an) sudah datang yakni Hadhrat Mirza Gulam Ahmad. Dialah Al-Masih dan Imam Mahdi yang dijanjikan dalam Al-Qur'an.<sup>10</sup> Perbedaan jelas yang tampak disini yakni mengenai kenabian H.Mirza Gulam

Ahmad. Ia mengaku bahwa ialah nabi terakhir yang memperoleh wahyu dari Allah setelah Nabi Muhammad SAW.

#### **2.4 Analisis Dinamika Konflik Ahmadiyah dan Islam (MUI)**

Sebagai masyarakat yang rentan konflik, persoalan segragasi etnis keagamaan menjadi sangat kuat sebagai penyebab dinamika konflik. Manusia sebagai aktor merupakan makhluk yang konfliktis, yakni makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.<sup>11</sup> Dengan demikian konflik itu akan senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat terlebih di Indonesia yang multi-agama. Ahmadiyah dan Islam (MUI) merupakan dua kelompok yang terus berkonflik sejak beberapa puluh tahun lalu.

Jika ditelusuri lebih jauh, pada dasarnya konflik agama yang terjadi antara Jemaah Ahmadiyah dengan umat Islam non Ahmadiyah sudah lama terjadi. Konflik ini mulai tampak jelas ketika pada tahun 1980 dalam Munas (Musyawarah Nasional) II untuk pertama kalinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan pernyataan mengenai Jemaah Ahmadiyah. Pernyataan tersebut mengenai pelarangan dan pembubaran Jemaah Ahmadiyah yang ada di Indonesia. Tahun 1986 kembali MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah dan menyusul fatwa pada tahun 2005 mengenai kesesatan, pelarangan dan pembubaran Jemaah Ahmadiyah. Akan tetapi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut masih belum berdampak pada kekerasan dimasyarakat (masih bersifat laten). Hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru konflik

---

<sup>10</sup><http://assajjad.wordpress.com/2008/04/20/mengua-k-sesatnya-ahmadiyah/>, Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 17 Juni 2011.

---

<sup>11</sup> Susan, N, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana: Jakarta, 2009.

sebisanya mungkin ditekan dengan pendekatan keamanan tradisional. Sebuah pendekatan yang mengutamakan kekuatan militer dan tidak menjadikan negosiasi sebagai perhatian politik rezim. Konflik yang muncul dinilai sebagai tindakan yang subversif dan mengancam integritas nasional. Sehingga diidentikkan dengan kondisi ketidakamanan dan ketidakharmonisan yang dapat mengganggu stabilitas politik. Maka dengan *military power* melalui lembaga-lembaga negara sebagai alat kontrol setiap konflik senantiasa ditekan dan harus dihapuskan.<sup>12</sup> Sampai pada tahun 2005 pun konflik antara Ahmadiyah dan umat Islam mayoritas masih dapat ditekan dengan alasan kebebasan beragama.

Pengabaian eksistensi dinamika sosial dan pelarangan konflik yang luar biasa inilah membuat segala aspirasi, modal sosial dan konflik yang terpendam muncul secara radikal pasca reformasi. Demikian pula dengan konflik agama yang melibatkan Ahmadiyah dan mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Fatwa MUI HAM (Hak Asasi Manusia) mulai terasa dampaknya dan merubah konflik laten menjadi konflik terbuka. Konflik yang sifatnya laten atau ketegangan-ketegangan yang selama bertahun-tahun terakumulasi dan berujung pada tindak kekerasan. Konflik yang berujung pada kekerasan ini mulai memuncak pada tahun 2006 dengan adanya penyerangan besar-besaran terhadap Jemaah Ahmadiyah di sejumlah tempat di wilayah Lombok Tengah, Jambi dan Jawa Barat.<sup>13</sup> Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) menjadi

alasan legal formal untuk melenyapkan kelompok Jemaah Ahmadiyah.

Agama merupakan pengetahuan dan kekuasaan. Kebenaran menjadi hal yang diperebutkan layaknya kekuasaan. Dengan pengetahuan dan kebenaran maka kekuasaan akan diperoleh. Pengetahuan dan kebenaran ini yang menjadi perebutan antar institusi dan dalam institusi itu sendiri untuk meraih kekuasaan<sup>14</sup>. Dari peristiwa diatas menunjukkan adanya kekuasaan yang dimiliki MUI (Majelis Ulama Indonesia), penafsirannya menggambarkan sebuah hegemoni kaum mayoritas terhadap minoritas. Kekuasaan dan kewenangan yang terlegitimasi mencoba melakukan penyeragaman terhadap aliran-aliran yang berbeda. Penyeragaman akan membentuk sebuah identitas dan mewujudkan sebuah kepatuhan kaumnya. Dengan kata lain akan terbentuk dua posisi dimana pihak yang dominan menguasai pihak yang minor (menguasai dan dikuasai). Sehingga terbentuk sebuah struktur beserta relasi-relasinya dalam sebuah kehidupan beragama. Ketika agama dilembagakan (menjadi sebuah institusi) maka produksi dan reproduksi kekuasaan atas kepentingan akan terjadi.

Seperti yang dikemukakan oleh Dahrendorf bahwa struktur-struktur sosial selalu ditentukan oleh kekuasaan yang memiliki relasi-relasi didalamnya. Esensi kekuasaan yang dimaksudkan adalah kekuasaan kontrol dan sanksi yang dilakukan oleh yang berkuasa untuk memberikan perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Kewenangan legal formal yang dimiliki MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai organisasi Islam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/bumi-manusia-anti-ahmadiyah-t25251/#p340422>. Diakses pada Sabtu, Tanggal 17 Juni 2011.

<sup>14</sup> Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat*, Gramedia: Jakarta, 2010.

menjadi sumber kekuasaan untuk melakukan kontrol dengan melakukan perintah dan pelarangan oleh kelompok-kelompok mayoritas (super) terhadap kelompok minoritas (subordinasi).<sup>15</sup>

Jika dilihat dari kacamata struktural, Anthony Giddens (Haryatmoko, 2010:91) menerangkan bahwa ideologi tidak terlepas dari strukturasi tindakan sosial. Struktur sosial merupakan tujuan atau hasil dari interaksi yang berulang dan berpola, namun sekaligus menjadi sarana yang mengkondisikan tindakan. Berikut skema interaksi dualitas struktur Anthony Giddens<sup>16</sup> :

INTE-RAKSI	KOMUNI-KASI	KEKUA-SAAN	SANKSI/MORALI-TAS
MODA-LITAS	KERANG-KA PENAFSIRAN	FASILI-TAS Ekonomi, Budaya, Politik Ideologi, Fisik, Sosial	NORMA Aturan, Hukum, Agama, Adat, Kebiasaan
STRUK-TUR	PEMAK-NAAN	DOMINASI	LEGITI-MASI

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa interaksi sosial dalam masyarakat selalu ditentukan oleh modalitas dan struktur itu sendiri. Ada tiga bentuk ineteraksi sosial yang ditampilkan oleh Giddens yakni komunikasi, kekuasaan dan moralitas. Dengan demikian segala kerangka penafsiran dalam segala interaksi selalu dipengaruhi oleh ketiga bentuk interaksi tersebut. Komunikasi selalu berupa sebuah kerangka penafsiran.

<sup>15</sup> Susan,N.2009.*Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*.Kencana:Jakarta

<sup>16</sup> Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskrimanasi*, Gramedia:Jakarta, 2010, hal. 294.

Disamping komunikasi ada kekuasaan yakni segala fasilitas termasuk ekonomi, budaya dan lainnya. Ditempat ketiga ada sanksi (moralitas). Hubungan ketiganya adalah bahwa kerangka penafsiran selalu ditentukan oleh kepemilikan fasilitas (kekuasaan). Pada akhirnya kerangka penafsiran dan kekuasaan membutuhkan sebuah pembenaran. Disinilah norma (moralitas) mendapatkan tempatnya, dan ketika terjadi konflik maka pihak masing-masing dengan kekuasaannya memiliki kemampuan transformatif yang mampu melakukan negosiasi dan gerakan sosial.<sup>17</sup>

Jika dikaitkan dengan fenomena Islam vs JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia), apa yang dikemukakan oleh Dahrendorf dan pemetaan Giddens sangat membantu. Islam, melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai organisasi kaum mayoritas yang memiliki legitimasi dimata publik memiliki kewenangan dalam memberikan kerangka penafsiran. Kerangka penafsiran itu sendiri ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh pihak yang memberi kerangka penafsiran tersebut. Kerangka penafsiran dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) semakin kuat ketika ada legitimasi norma Islam (Hadist, tafsir dan sebagainya) yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

## 2.5 Hak Asasi Manusia (HAM) Menjawab

*Starting point* dari sejarah perjalanan umat manusia yakni pada peristiwa penandatanganan di Istana Chaillot-Paris, 10 Desember 1948 oleh delegasi bangsa-bangsa atas pernyataan HAM (Hak Asasi Manusia). Penandatanganan yang dilakukan

<sup>17</sup> Susan,N.2009.*Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*.Kencana:Jakarta



oleh banyak bangsa dengan ajaran agama dan sistem politik yang berbeda-beda pula menandakan bahwa adanya penghargaan dan kebersamaan meski beda keyakinan. Peristiwa ini dapat menjadi dasar pemikiran kita bahwa “agama itu untuk manusia” bukan sebaliknya. Sehingga antara HAM HAM (Hak Asasi Manusia) dan agama memiliki kedudukan yang sama penting dan saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan sosial.

Ketika berbicara HAM HAM (Hak Asasi Manusia), maka manusia berhak untuk menentukan agama mana yang hendak dianut. Di sini peran agama mesti dipahami sebagai kepentingan manusia/pemeluknya. Harus dicermati bahwa yang menjadi syarat mutlak untuk dipahami yakni agama sebagai hak dasar yang melekat dalam diri setiap umat manusia. Tidak ada pemaksaan atas itu. Agama yang dipahami dan dimaknai sebagai sumber kedamaian, ketenangan hendaklah menjadi penopang dalam hal kemanusiaan. Dengan demikian harus ditekankan bahwa titik temu segala kepercayaan, entah agama atau sebutan yang lain adalah pengakuan pada hak yang mendasar sebagai manusia, ketika pengakuan itu dapat terlaksana agama akan mendapatkan tempatnya untuk melegitimasi sebuah kebenaran yang berpangkal pada HAM (Hak Asasi Manusia).

### **III. KESIMPULAN**

Dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain selalu membawa sebuah ketidakadilan. Fenomena kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah adalah salah satu contoh bagaimana ketidakadilan itu dapat muncul. Ketidakadilan juga akan muncul ketika legitimasi kebenaran ditentukan oleh pihak yang berkuasa. Di sisi yang lain, pihak yang merasa dirugikan

akan berjuang mempertahankan hak mereka sebagai manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun.

Kasus JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia), kemudian muncul pula pengusiran terhadap aliran Syi’ah yang terjadi akhir-akhir ini cukup menyayat hati dan mencoreng negara yang mengakui HAM (Hak Asasi Manusia) dan ber-Bhinneka Tunggal Ika. Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Hak untuk hidup, memperoleh perlindungan dari negara dan rasa aman. Selama ini tuduhan yang dilontarkan pada JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia) terkait penistaan agama, sedangkan pihak JAI bersikeras menolak tuduhan tersebut. Negara Indonesia sebagai negara hukum hendaknya memfasilitasi adanya perbedaan ini dengan sebuah dialog dua arah dan memprosesnya melalui hukum untuk membuktikan tuduhan-tuduhan yang berujung pada kekerasan tersebut. Semua pihak harus taat pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Disamping itu tentunya pemerintah dan para penegak hukum dapat bersikap dan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran UU (Undang-undang) yang berlaku demi tegaknya negara Pancasila yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia).

Tidaklah begitu mudah untuk menyelesaikan konflik terkait keyakinan (agama). Akan tetapi jika konflik dapat dikelola dengan baik maka tidak akan sampai memicu pada munculnya sebuah kekerasan. Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang tak dapat dihindari. Butuh sebuah sistem penanganan (tata kelola) yang pasti dan memungkinkan terpeliharanya hak tiap pihak. Satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa HAM (Hak

Asasi Manusia) telah memberi jalan bagaimana kelompok dapat menghormati kebebasan beragama apapun. Kekuatan HAM (Hak Asasi Manusia) dan penegakannya menjadi inti suksesnya keadilan dalam masyarakat majemuk. Jika hal ini dapat dilakukan, tidak ada sebuah pertanyaan lagi bagaimana agama harus berdiri dan mengapa harus ada kelompok yang dimusuhi. HAM (Hak Asasi Manusia) menjadi patokan bagaimana setiap individu harus saling menghargai. Adanya dialog dua arah, sikap anti kekerasan, saling menghargai kepercayaan orang lain dan hak-hak asasi sesama mesti dikembangkan dan dijadikan landasan dalam setiap bertindak. Anti-kekerasan yang berarti melawan antagonisme (Gandhi) dan mempersiapkan resolusi konflik. Dengan adanya/melakukan dialog dua arah maka resolusi konflik dapat dilakukan.

Sebagai penutup mengutip dari Francis yang mengungkapkan, hendaknya kita semua menekan perbedaan demi tujuan bersama. Bersikap anti-kekerasan, yang intinya adalah tanggapan terhadap kekerasan struktural, merangkul konflik sebagai sarana perubahan dan membangun praktek tindakan anti-kekerasan, yg menekankan pada pentingnya informasi dan pengertian pihak lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang menghargai nilai kemanusiaan atas semua pihak.<sup>18</sup> Resolusi konflik bisa dilihat sebagai tanggapan dari kekerasan dan kesengsaraan yang kerap menjadi karakter dalam sebuah konflik. Faktor yang menciptakan keadilan adalah sikap saling menghormati kebutuhan dari setiap pihak yang terlibat dan desakan akan sebuah kesamaan kedudukan. Fokus dalam dialog

dan pengumpulan informasi yang sistematis juga perlu diperhatikan. Sehingga konflik tidaklah harus selalu berujung pada kekerasan tetapi konflik yang berujung/berakhir dengan sebuah perdamaian tanpa adanya korban nyawa manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Haryatmoko, 2010, *Dominasi Penuh Muslihat*, Gramedia, Jakarta.

Haryatmok, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta.

Susan,N., 2009, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Trijono,Lambang., 2007, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor, Yogyakarta.

Kahmad, Dadang., 2006, *Sosiologi Agama*, Rosda Karya, Bandung.

Francis,D., 2006, *Teori Dasar, Transformasi, Konflik Sosial*, Quills, Yogyakarta.

### Surat Kabar

Harian Kompas. Edisi Senin, 14 Februari 2011.

### Internet

<http://ahmadiyya.or.id/>. Diakses pada Sabtu, Tanggal 18 Juni 2011.

<http://www.alislam.org/indonesia/latar.html>. Diakses pada Sabtu, Tanggal 17 Juni 2011.

<sup>18</sup> Francis, D., *Teori Dasar, Transformasi, Konflik Sosial*, Quills: Yogyakarta, 2006, hal.85-89.

<http://assajjad.wordpress.com/2008/04/20/menguak-sesatnya-ahmadiyah/>. Diakses pada Sabtu, Tanggal 17 Juni 2011.

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=53](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53)